BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah individu muda dalam segi usia dan mentalitas, serta dalam perjalanan hidupnya, karena mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya (Kosnan, 2005: 99). Karena alasan ini, penting bagi kita untuk memberikan perhatian serius kepada anak. Namun, ironisnya, walaupun mereka adalah individu yang sangat rentan dan lemah dalam kehidupan sosial, anak seringkali ditempatkan dalam kedudukan yang merugikan mereka. Mereka sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, dan yang lebih buruk lagi, mereka kerap menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka.

Dalam hukum positif telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat berbagai definisi mengenai anak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta pandangan dari para ahli yang ahli di bidangnya. Namun, beberapa kasus terdapat fakta bahwa anak juga dapat melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah melakukan pelecehan seksual.

Perbuatan pelecehan seksual dapat berakibat negatif pada sisi mental maupun psikis. Akibat pelecehan seksual tidak hanya di dapat oleh korban, tetapi juga si pelaku. Berdasarkan sisi psikologis, ada kemungkinan pemikiran atau sikap yang tidak sesuai dengan usianya, mengingat pelaku tindak pelecehan seksual masih di bawah umur. Kejadian pelecehan seksual dapat memberikan trauma dan rasa bersalah pada pelaku.

Tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pengetahuan seksualitas dan meniru tindakan perilaku pelecehan seksual. Dari kurangnya pengetahuan akan seksualitas tersebut anak menjadi tidak memahami dan tidak dapat menyortir hal yang dilihat oleh anak tersebut merupakan perilaku menyimpang,

Kendati belum mencapai usia dewasa, anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap akan menerima hukuman atas perbuatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai pengaturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pada Undang-Undang tersebut batasan usia Anak Nakal (anak yang melakukan tindak pidana) dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. terdapat 68 pasal yang tercakup dalam 8 bab dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23 Ayat (1) menguraikan sanksi inti dan sanksi tambahan yang dikenakan pada Anak Nakal, sementara ayat (2) merinci sanksi inti seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Di samping sanksi inti tersebut, ayat

(3) menyebutkan bahwa Anak Nakal juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu atau kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa Anak Nakal dapat dikenai pidana penjara yang durasinya setinggi-tingginya satu per dua dari ancaman maksimal pidana penjara yang diberlakukan pada orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku dewasa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dihukum kurungan selama 5-15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, anak di bawah umur dapat menerima pidana penjara dengan batas waktu maksimal 7,5 tahun.

Dalam perspektif islam, perilaku pelecehan seksual ini merupakan termasuk Ta'zir. Ta'zīr merupakan kasus pidana yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukannya sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan (Junaidy dkk, 2020: 13). Salah satu daerah yang menggunakan pedoman hal tersebut adalah Peraturan Daerah Aceh.

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 47 berbunyi bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia di setiap tahunnya selalu ada korban yang merupakan anak juga. Beberapa kasus pelecehan seksual tersebut yaitu:

1. Kasus yang telah terjadi di Aceh pada tanggal 16 Mei 2019 yang dilakukan oleh inisial “NA” telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Terdakwa diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dan UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. NA telah dijatuhi hukuman Pidana terhadap Anak berupa Pembinaan dalam lembaga yaitu di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh selama 6 (Enam) bulan. Bukti perbuatan dari perbuatan kejinya tersebut adalah terdapatnya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur anak berwarna biru putih motif boneka
 - 1 (satu) buah Celana pendek anak berwarna abu-abu gelap
 - 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna kuning

Barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada Anak korban Dzakira Aftani Iasya binti Yusrizal. Selain itu NA tersebut dibebankan dengan harus membayar denda biaya Perkara sebesar Rp. 2.000;(dua ribu rupiah).

2. Kasus yang telah terjadi di Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019 yang dilakukan oleh inisial “HA” dan “MA” telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Terdakwa diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dan UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang

sistem peradilan pidana anak. Kronologi dari kejadian tersebut adalah pada pukul 14.00 WIB awalnya terdakwa MA melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban dengan cara pada saat saksi korban menjumpai MA yang sedang di rumah. Lalu ketika saksi korban sudah berada di rumah MA langsung dilecehkan. HA yang bertujuan untuk mengajak bermain MA mendatangi rumah MA dan ia melihat MA sedang melakukan perilaku menyimpang. HA pun akhirnya lecehkan saksi korban juga seperti yang dilakukan MA. HA dijatuhi sanksi pidana berupa hukum cambuk sebanyak 30 kali dan MA 20 kali di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ditambah uqubat berupa pembinaan oleh Negara selama 1 (satu) tahun dengan dititipkan pada Pesantren yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Bukti dari perbuatan dari perbuatan kejinya tersebut adalah terdapatnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab perempuan warna hitam motif bunga
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar tengkorak.
- 1 (satu) helai rok berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream.

Selain itu kedua pelaku pun harus membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sebesar Rp.3.000

Berbagai langkah telah diambil dan terus diperjuangkan untuk mengatasi tindak pidana terhadap anak, walaupun sulit apabila menghilangkan sepenuhnya tindak pidana yang menimpa anak di bawah umur. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana terhadap anak, termasuk pelecehan seksual, cenderung persisten dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pada awalnya, beragam usaha telah dilakukan baik dalam kerangka Hukum Pidana Positif Indonesia maupun Hukum Pidana Islam untuk melarang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam penjelasan di atas, terdapat beberapa kelemahan dalam aspek hukum, salah satunya adalah tidak ada ketentuan yang menjelaskan dengan jelas tentang kriteria anak yang dikecualikan dalam isi pasal yang telah disebutkan. Ketiadaan kejelasan mengenai subjek hukum dalam isi teks hukum tersebut mengakibatkan kendala dalam implementasi hukum. Hal tersebut terbukti pada kasus yang ditemukan pada fakta dilapangannya bahwa ketiga tersangka pada kedua kasus tersebut tidak dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pengaturan sanksi hukuman yang dilihat dari subjek hukum, serta bagaimana perbedaan pandangan antara Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai masalah ini.

Bertolak dari pemikiran tersebut, peneliti akan membahas bagaimana pandangan hukum positif terhadap sanksi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

B. Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang dapat menjawab latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum islam dan hukum positif mengatur sanksi terhadap pelecehan seksual oleh anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum antara hukum positif dan hukum islam terkait dengan penerapan sanksi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan meneliti pandangan hukum islam dan hukum positif pada hukuman anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Mengkaji dan meneliti pandangan antara hukum positif dan hukum islam terkait dengan hukuman anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, terutama di ranah hukum pidana, perundang-undangan, dan sistem peradilan pidana terkait hukuman terhadap anak yang terlibat dalam pelecehan seksual, sejalan dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran terhadap kasus yang terkait dengan topik hukum ini dan bertujuan untuk melengkapi pengetahuan terutama bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan suatu perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip atau inti kehidupan masyarakat Indonesia. Sila pertama berperan sebagai landasan ontologis, menciptakan gambaran manusia Indonesia yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan mereka kekuatan untuk mengontrol dan memberikan pertolongan dengan prioritas. Sila kedua memiliki sifat normatif karena mengandung tanggung jawab untuk bertindak dengan adil dan beradab. Sila ketiga berfungsi sebagai landasan operasional, yang menjelaskan batasan antara kepentingan individu, kepentingan negara, dan kepentingan

bangsa. Sila keempat tentang kehidupan dalam bingkai bernegara, yakni pemahaman diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arahan kepada setiap individu untuk menegakkan keadilan, bersama-sama dengan orang lain dan seluruh Masyarakat (Bakhri, 2010).

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memungkinkan hukum menjadi panglima tertinggi dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum dianggap sebagai serangkaian pedoman yang mengatur perilaku dan kontribusi positif manusia dalam kehidupan berkelompok dan berbangsa. Pokok bangsa Indonesia sebagai entitas yang pantas mencakup dampak dari kewajiban bangsa untuk menjaga semua warganya melalui sistem hukum, terutama dalam menjaga hak asasi mereka guna melindungi hak-hak tersebut dan mencapai kesejahteraan bersama, dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam sila keempat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab melindungi negara dan semua warganya serta berupaya meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Rasjidi, 2012: 181).

Ditinjau dari perspektif Pancasila terkait kasus pelecehan seksual oleh anak, jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum, mengingat anak adalah potensi dan pewaris bangsa yang harus dihormati. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Sila Kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Sila ini menekankan pengakuan terhadap kesetaraan derajat, hak, dan kewajiban di antara semua manusia. Prinsip saling mencintai sesama manusia,

mengembangkan sikap tenggang rasa, menolak kekerasan terhadap orang lain, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan, menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional. Oleh karena itu, sikap saling hormat dan kerjasama dengan bangsa lain merupakan nilai yang harus diperjuangkan.

Indonesia, sebagai negara hukum serasi dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, khususnya dalam bab 10A yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan dalam pasal 28B (1) bahwa setiap individu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B (2) juga menegaskan hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Proses pembentukan hukum di Indonesia memiliki empat fungsi yang melibatkan aspek-aspek berikut (Hartono, 1988: 10):

1. Hukum sebagai pemeliharaan dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana menegakkan keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan Masyarakat.

Sebagai aturan umum,, hukum pidana islam memiliki tiga asas utama, yakni asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

1. Asas Keadilan.

Dalam ayat dan hadits nabi, pentingnya untuk seorang muslim memastikan keadilan di lingkungan keluarganya dan para anggota keluarga yang terdekat.

Prinsip keadilan hukum Islam ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan prinsip keadilan:

“Berlakulah adil diantara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anak anak kalian” (HR. Abu Dawud Dan Al-Nasa’i Dari Al-Nu’man Bin Basyir, n.d.).

Memberikan perlakuan adil kepada anak-anak tidak berarti memberikan pemberian yang sama kepada mereka. Contohnya, seorang anak yang berada di kelas tiga SD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak yang berada di kelas tiga SMP. Oleh karena itu, adil seharusnya bersifat proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum menyatakan bahwa setiap tindakan tidak dapat diterima kecuali dengan merujuk pada prinsip ataupun peraturan yang menjadi bagian dari Al-Qur'an, hadits, atau fatwa para peneliti. kaidah ini mencakup standar legitimasi dalam hukum pidana Islam, dan salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan argumen kuat adalah surat Al-Isra ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”

Salah satu bukti dalam aturan Islam adalah asas kepastian hukum, terutama dalam membatasi perkawinan antara kerabat, terkecuali pada anak laki-laki dan perempuan dari keturunan Nabi Adam. Al-Qur'an menyampaikan hal ini dengan frase "illa ma qad salafa" (kecuali yang sudah lewat).

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan merupakan suatu prinsip kepastian hukum dan keadilan yang selaras dengan norma. Asas Kemanfaatan memiliki peran penting untuk menegakkan kepastian dan keadilan dalam hukum baik bagi individu maupun untuk pihak lain yang terlibat.

Terutama bila dihubungkan dengan asas-asas hukum pidana Islam, terdapat enam asas utama, melibatkan legalitas, tidak berlaku surut, praduga tak bersalah, wajib dibatalkan hukum ketika ada keraguan, tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak lain, dan kesamaan di hadapan hukum.

A. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah norma yang menerangkan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada peraturan yang berlaku tanpa dasar hukum yang mengaturnya. Panduan keabsahan ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai pidana, kecuali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana sebelumnya. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip hukum Belanda "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak ada pelanggaran, tidak adanya hukuman yang tidak didahulukan oleh undang-undang terlebih dahulu). Prinsip ini sejalan dengan Surah Al-Isra ayat 15 dan Surah Al-An'am ayat 19, yang menegaskan standar keabsahan, dengan Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman yang sah. Oleh karena itu, otoritas yang sah diakui karena telah ada ayat atau hadits yang mengatur hal-hal terkait sebelum tindakan tersebut diberlakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

B. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengungkapkan bahwa norma ini melarang penggunaan hukum pidana secara retroaktif, terutama dalam situasi di mana tidak ada pedoman yang jelas. Pada akhirnya, sistem hukum pidana harus tetap ditegakkan. Melanggar norma ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan umum (2003: 12). Asas ini sebetulnya berasal dari prinsip legalitas. Hukum Islam memiliki banyak bukti yang menegaskan prinsip ketidak berlakunya hukum surut (Santoso, 2000: 120).

C. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang dituduh melakukan kesalahan dianggap tidak bersalah sampai hakim memiliki bukti yang sangat kuat dan kemungkinan besar untuk menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan. Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, asas praduga tidak bersalah mengindikasikan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan bahwa individu tersebut telah secara konkret bersalah tanpa adanya keraguan.

D. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini secara erat berkaitan dengan isu kewajiban pidana, menegaskan bahwa seseorang harus memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diperbolehkan untuk mencoba menyalahkan kelompok lain. Oleh karena itu, asas larangan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain berlaku hanya

dalam lingkup dunia ini, sementara dalam pengadilan Tuhan di alam semesta yang lebih besar, hal tersebut tidak berlaku dengan cara yang serupa.

E. Asas Kebutuhan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Asas yang berdasarkan pada sebuah hadits,, menekankan bahwa suatu individu seharusnya menghindari penerapan hukuman hadd jika terdapat unsur ketidakpastian. Hal ini dianjurkan dengan alasan bahwa pada dasarnya lebih baik bagi hakim yang ditunjuk untuk keliru dalam membebaskan seseorang daripada memberikan putusan hukuman.

F. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Asas yang berkaitan dengan ajaran Allah SWT dan ucapan para nabi tentang hukum pidana Islam. Tidak adanya diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya hal yang pokok adalah sejauh mana seseorang bertaqwa di hadapan Tuhan.

Hukum positif mengatur berbagai aspek seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Tata Usaha Negara, dan Administrasi. Di setiap aspek hukum tersebut, ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum pidana, diskusi tentang pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa tidak terlihat perlakuan yang tidak adil dalam hukum, di mana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara di bawah hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil. Sistem tanggung jawab bagi pelaku kejahatan dalam penanganannya saat ini mengadopsi prinsip kesalahan menjadi suatu konsep yang sejalan dengan asas legalitas. Tanggung jawab pidana mencerminkan bentuk pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana, diatur melalui

prinsip kesalahan dalam pelaksanaan tindakan kriminal tersebut.

Dengan demikian, hadirnya tanggung jawab hukum bagi pelaku kejahatan disebabkan oleh cara hidup atau pencapaian yang bertentangan dengan hukum, serta kesalahan yang diperbuat dengan metode individu.

Roeslan Saleh (1982: 10) menyatakan bahwa "Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana bisa dikatakan akan melihat satu atau dua aspek yang harus diperhatikan dengan pandangan falsafah, Salah satunya yaitu keadilan".

Kerangka pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana positif menganggapnya sebagai sebuah kesalahan karena tindak pidana hanya dikaitkan dengan perbuatan yang dianggap keliru. Apakah individu yang terlibat dalam tindakan tersebut kemudian dihukum bergantung pada kasusnya, yaitu apakah pelaku tindakan tersebut bersalah atau tidak. Jika terbukti bahwa individu yang melakukan perbuatan tersebut melanggar hukum, maka dia akan dihukum. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesalahan, bahkan jika perbuatan tersebut dianggap tidak pantas, individu tersebut tidak akan dijatuhi hukuman. Asas ini merupakan asas tidak tertulis: "Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan", yang menjadi landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelakunya (Saleh, 1982: 75).

Kendati belum mencapai usia dewasa, anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap akan menerima hukuman atas perbuatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai pengaturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Menurut Undang-Undang tersebut, batasan usia Anak Nakal (anak

yang terlibat dalam tindak pidana) yang dapat dihadirkan dalam Sidang Anak adalah minimal 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Terdapat 68 pasal yang tercakup dalam 8 bab dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23 Ayat (1) menguraikan sanksi inti dan sanksi tambahan yang dikenakan pada Anak Nakal, sementara ayat (2) merinci sanksi inti seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Di samping sanksi inti tersebut, ayat (3) menyebutkan bahwa Anak Nakal juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa perampasan barang tertentu atau kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa Anak Nakal dapat dikenai pidana penjara yang durasinya setinggi-tingginya satu per dua dari ancaman maksimal pidana penjara yang diberlakukan pada orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku dewasa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dihukum kurungan selama 5-15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, anak di bawah umur dapat menerima pidana penjara dengan batas waktu maksimal 7,5 tahun.

Hukum Islam melibatkan berbagai perspektif yang luas, dari ketentuan mengenai individu dengan Tuhannya, hingga prinsip-prinsip mendasar bagi sesama manusia. Salah satu bagian dari hukum Islam adalah hukum pidana Islam yang dikenal sebagai Jinayah, yang secara terminologi merujuk pada tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi hukuman (Nur, 1999: 32).

Prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan seseorang hanya akan bertanggungjawab atas Jarimah-nya sendiri dan tidak akan dibebani dengan perbuatan jarimah orang lain. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada jinayah, ini mengacu pada penugasan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu, yang memahami maksud dan tujuan dari Tindakan dan tanggung jawab ini harus ditegakkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Adanya tindakan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan keinginan sendiri
3. Pihak pembuat menyadari perbuatan sebagai akibatnya.

Ketiga hal ini telah disebutkan dan harus terpenuhi, jika salah satunya hilang, maka pertanggungjawaban pidana tidak berlaku. Dari tiga kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab tidak dikenakan pada orang yang belum mencapai usia baligh, individu yang mengalami gangguan jiwa atau kegilaan, saat tertidur, atau dalam kondisi terpaksa (Doi, 1992: 16). Faktor yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana atas tindakan asusila adalah tindakan bertentangan dengan ketentuan syariat atau perilaku yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan syari'at (Hanafi, 1994: 177).

Perzinahan merupakan fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, terjadi di berbagai tempat dan waktu dalam interaksi antar manusia. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang untuk mengawal ataupun memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan zina. Zina adalah suatu bentuk tindak pidana, yang merujuk pada tindakan yang dilarang

dan diancam pidana menurut peraturan hukum tertentu. Perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan untuk menghindari suatu perbuatan atau kejadian tertentu, dan ancaman pidana ditujukan pada individu yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Hubungan yang erat terjalin antara peristiwa juga individu yang menjadi penyebabnya (Moeljatno, 2009: 59).

Hukum pidana merupakan kepingan dari sistem hukum yang berperan dalam suatu negara, yang memiliki landasan juga norma-norma guna menetapkan:

1. Tindakan yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu, bagi siapa pun yang melanggar norma tersebut, yang menetapkan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan.
2. Menetapkan kapan dan bagaimana mereka dapat dihukum atau diancam jika melanggar peraturan.
3. Mengatur prosedur bagaimana hukuman pidana dapat diberlakukan jika ada individu yang dituduh melanggar aturan tersebut.

Hukum Islam menerapkan beragam peraturan, mencakup aspek ibadah, muamalah, dan pidana Jinayat (Daud, 2011: 55–57). Berkenaan dengan pidana Jinayah, terdapat ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenai sanksi, baik itu Hudud maupun Ta'zir. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir, karena dalam Islam, aturan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hak individu, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat (Zubaedah, 2010: 119).

Kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Isra': ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Israa': 32)

Islam mendorong adanya perhatian terhadap dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi (kehidupan keluarga) dan kehidupan bersama (kehidupan sosial). Dalam ajaran Islam juga diperintahkan untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran: ayat 14 sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَآبِ ۝ ١٤

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". (QS. Al-Imran": 14)

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan kriminal. Sanksi pidana bagi pelaku zina yang sudah menikah mencakup hukuman rajam. Rajam merupakan hukuman paling berat untuk pelaku zina yang telah menikah dan dianggap muhsan. Pertimbangan mengenai sanksi pidana menurut perspektif hukum ini menjadi tema penelitian yang menarik untuk diperdalam.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sanksi pidana menurut kerangka berpikir hukum, dengan membandingkan peraturan pidana Indonesia dan peraturan pidana Islam.

Berbeda dengan aturan pidana Islam, Perda Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat membedakan antara hukum jarimah zina dan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Perihal jarimah Zina dijelaskan pada bagian kelima Pasal 33 Ayat dua hukuman orang yang melakukan perbuatan Zina adalah diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan perihal pelecehan seksual terhadap anak ini dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 90 dan denda maksimal 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan.

F. Metode Penelitian

Dalam menggali isu tertentu, diperlukan suatu pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah. Arief Subyantoro dan FX Suwanto, sebagaimana dikutip dalam buku Anthon F. Susanto, menggambarkan metode sebagai suatu prosedur atau langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu hal (2015: 159–160). Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Pandangan Ronny Hanitijo Soemitro terkait dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder (Soemitro, 1982: 24).

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis spesifikasi penelitian yang diterapkan ialah deskriptif-analitis, yang merujuk pada pendekatan yang memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan rasional, dan kemudian dilakukan analisis. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan untuk menggali pemahaman dari berbagai sumber literatur serta norma-norma yang berlaku di Indonesia terkait dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis data secara terstruktur, berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan argumentasi yang kokoh dan jelas.

2. Metode Pendekatan

Untuk menjawab pertanyaan pada identifikasi masalah penelitian ini, pendekatan yang dianggap sesuai adalah teknik yuridis-normatif. Sementara itu, Gutteridge mengemukakan konsep regulasi komparatif sebagai metode untuk mengamati dan memahami hukum. Gutteridge membedakan dua jenis regulasi komparatif, yaitu peraturan deskriptif komparatif yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta serta perbandingan peraturan yang memiliki tujuan tertentu (Marzuki, 2005: 132). Van Apeldoorn berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah sebuah cabang ilmu yang mendukung studi hukum dogmatik dengan cara membandingkan dan menilai peraturan hukum serta keputusan-keputusan pengadilan dalam konteks sistem hukum yang berbeda.

3. Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai langkah untuk memperoleh dokumen yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan tindak pidana primer adalah sumber tindak pidana yang dapat bersifat otoritatif, khususnya otoritatif artinya memiliki kewenangan. yang utama dalam kajian ini yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Pustaka ini mencakup data mengenai sumber primer, yang merujuk pada berbagai sumber seperti buku, publikasi ilmiah, koran, majalah, literatur fiqh, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan informasi dari internet yang relevan dengan konten yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai sumber tersier mencakup bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber ini melibatkan berbagai kamus hukum dan politik, serta ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia, sesuai dengan banyaknya definisi dalam sumber-sumber tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sumber data dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, menyusunnya menjadi satu data kesatuan, menghimpun bahan yang relevan dengan permasalahan, kemudian membandingkannya dengan data hukum primer dan hukum sekunder sebagai sumber data yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data perpustakaan, melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum seperti buku dan jurnal, serta peralatan tulis untuk mencatat informasi yang ditemukan. Selain itu, perangkat komputer dan ponsel juga digunakan untuk keperluan pengetikan dan alat bantu lainnya yang mendukung proses pengumpulan data di lingkungan perpustakaan.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dianalisis menggunakan berbagai metode. Dalam hal ini, penulis menerapkan pendekatan analisis yuridis-kualitatif dan evaluasi materi. Analisis yuridis-kualitatif digunakan untuk menguraikan temuan, dengan menitikberatkan pada analisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan terkait dengan isu yang sedang dibahas. Hal ini diilustrasikan melalui contoh kasus yang terjadi.

Sementara itu, analisis konten, seperti yang dijelaskan oleh Weber, merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan serangkaian prosedur untuk menarik kesimpulan yang akurat dari buku atau dokumen. Menurut Krippendorff, metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan replikatif dan benar dari data, sepenuhnya berdasarkan konteksnya (Abdurrahman, 2005: 13). Dalam konteks penelitian ini, metode ini diterapkan untuk mengkaji pasal-pasal atau aturan-aturan hukum yang tercantum di dalamnya.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif sebagai alat perbandingan antara dua sudut pandang, yaitu Hukum Positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam tindak pidana serta batasan subjek hukum bagi pelaku.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan di lokasi yang terkait dengan isu yang akan dibahas oleh penulis. Lokasi penelitian hukum ini mencakup:

1. Studi Literatur ditempatkan di Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
2. Studi Literatur ditempatkan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya A.H. Nasution No.